

Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Ekoeduwisata Bandar Bakau Kota Dumai

Ruth Aldiz Khatarine Gultom¹ Dadang Mashur²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: ruthaldiz@gmail.com¹

Abstrak

Kawasan Ekoeduwisata Bandar Bakau merupakan salah satu produk wisata yang cukup terkenal di Kota Dumai. Sebagai produk wisata, tata kelola kawasan dengan basis mengandalkan kekuatan masyarakat akan mampu menguatkan perekonomian secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian biodiversitas. Namun, penguatan masyarakat masih bertumpu pada pola kerjasama dengan pihak eksternal dari kelompok masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat di kawasan ekoeduwisata Bandar Bakau Kota Dumai dan menganalisis hambatan pemberdayaan masyarakat. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo & Dwijowijoto (dalam Bahri, 2019), yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses dan tujuan yang meliputi penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk pemberdayaan masyarakat di kawasan ekoeduwisata Bandar Bakau Kota Dumai belum sepenuhnya berjalan dengan baik di karenakan masih ada bentuk pemberdayaan masyarakat yang masih terhambat yang bisa di lihat dari segi kemampuan masyarakat Bandar Bakau yang belum bisa seutuhnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan maupun kelola kawasan wisata sehingga mempengaruhi keberdayaan masyarakat. Adapun faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di kawasan ekoeduwisata Bandar Bakau yaitu 1)Program pemberdayaan yang tidak berkelanjutan, 2) regulasi yang mengatur mengenai upaya pengelolaan *mangrove* secara konservasi, 3) kurangnya inovasi dalam pemanfaatan *mangrove* dan 4)lemahnya komitmen masyarakat

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Ekoeduwisata



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional selalu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*)(Yunus dkk, 2017). Hal ini tentu perlu menjadi perhatian karena dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat mengandalkan potensi hayati atau kualitas SDM yang dimiliki dapat menciptakan masyarakat yang mandiri secara berkelanjutan. Ada banyak potensi biodiversitas maupun hayati di Indonesia yang dapat dikembangkan sehingga mampu menopang perekonomian masyarakat.

Mangrove merupakan salah satu biodiversitas unggulan Indonesia. Secara ekologis, hutan *mangrove* mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai daerah asuhan dan pemijahan dari berbagai organisme laut seperti udang, ikan, dan kerang-kerangan (Zamora, 1987). Hutan *mangrove* berperan sebagai pelindung pantai dari bahaya tsunami, penahan abrasi dan perangkap sedimen, pendaur hara, menjaga produktivitas perikanan, peredam

intrusi air laut, penyangga kesehatan, menjaga keanekaragaman hayati, dan menopang ekosistem pesisir lainnya. Ekosistem *mangrove* merupakan penopang ekosistem pesisir lainnya karena mempunyai saling keterkaitan, terutama ekosistem lamun dan terumbu karang. Hutan *mangrove* adalah hutan yang tumbuh di muara sungai, daerah pasang surut atau tepi laut (Edi Mulyadi, et.al 2010). *Mangrove* merupakan sekelompok tumbuhan yang hidup di daerah pesisir terdiri dari berbagai jenis dan suku, tetapi mempunyai persamaan dalam hal adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut (ekosistem peralihan antara daratan dengan perairan sekitar muara sungai). *Mangrove* merupakan produk Sumber Daya Alam Hutan dan Ekowisata (SDAHE) yang berupa manfaat langsung (*tangible*) atau manfaat tidak langsung (*intangibile*) meliputi jasa wisata alam/rekreasi, jasa perlindungan tata air/hidrogen, keindahan, keunikan serta penyerahan dan penyimpanan karbon (Bonorowo, 2015).

Berdasarkan peta *mangrove* nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, diketahui bahwa total luas *mangrove* Indonesia seluas 3.364.076 Ha. Di tahun yang sama, luas *mangrove* di provinsi Riau tercatat mencapai 224.895 Ha. Kota Dumai sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Riau, memiliki lahan *mangrove* seluas 3.477 Ha. Kota Dumai memiliki kawasan sentra dari konservasi *mangrove* bernama Bandar Bakau. Kawasan ini terletak di Jalan Nelayan Laut, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat serta memiliki luas 31 Ha dan yang baru dikelola masih seluas 13 Ha, berada di kuala Sungai Dumai. Kawasan Bandar Bakau Dumai, awalnya merupakan kawasan pengembangan Pelindo. Terbitnya tiga aturan perundang-undangan telah mempertegas status lahan ekowisata *mangrove* Bandar Bakau Dumai sebagai Hutan Produksi Terbatas. Ketiga aturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, yang merupakan bentuk turunan implemetasi dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Riau. Lahirnya peraturan tersebut, pengelolaan Bandar Bakau dibawah pengawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Unit III Riau) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau termaktub dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau No. 525/PPH/1261 tahun 2021.

Kekayaan alam yang terkandung dalam Bandar Bakau merupakan sumber daya alam yang sangat krusial untuk dipertahankan mengingat segala aktivitas yang dilakukan masyarakat akan sangat berdampak bagi ekosistem flora dan fauna. Aktivitas dikawasan ini yaitu pelabuhan dan permukiman. Mengingat *mangrove* merupakan tanaman yang berperan penting di bagian pesisir lautan, sehingga potensi dan nilai gunanya patut untuk dilestarikan dan diperhatikan. Potensi Bandar Bakau Dumai bersumber dari kekayaan vegetasi *mangrove* (Roja, 2022). Dijumpai sebanyak 17 jenis *mangrove* sejati dan 22 jenis *mangrove* asosiasi di Bandar Bakau Dumai. Pada tahun 2020, Bandar Bakau menutup kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga tidak ada kunjungan sama sekali dan pada tahun 2021 kunjungan kembali dibuka dengan total jumlah kunjungan mencapai 1550 orang wisatawan. Kemudian pada tahun 2022, kunjungan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah sebanyak 1027 orang. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu omset pemasukan yang cukup baik untuk sebuah destinasi wisata. Dengan mendayagunakan kemampuan masyarakat dan potensi lingkungan setempat akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Terlebih pengelola dari Bandar Bakau sendiri adalah masyarakat setempat yang memiliki kepedulian besar terhadap lingkungan terutama eksistensi flora *mangrove*.

Dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan sebagai implementasi dari peraturan Gubernur Riau Nomor 76 tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang mana Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun sasaran dalam Unit Pelaksana Teknis tersebut salah satunya ialah : Tenaga Teknis Kehutanan (aparatur pemerintah) yang bertugas di KPH/KPHP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang mana Bandar Bakau Kota Dumai berada dibawah pengawasan KPH Bagan Siapi api Unit III Provinsi Riau. Dibentuknya Kelompok Tani Hutan sebagai wadah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan Hutan. Di Bandar Bakau memiliki Kelompok Tani Hutan yang bernama Kelompok Tani Hutan Bandar Bakau. Terdapat 3 pengurus dan 20 anggota dari KTH Bandar Bakau. Hal ini sejalan dengan peraturan mengenai pembuatan KTH menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 89 tahun 2018 mengenai KTH pada pasal 4 ayat 1 bahwa anggota KTH paling sedikit memiliki anggota berjumlah 15 orang.

KTH dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumber daya), keakraban, keserasian hubungan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya dan dipimpin seorang ketua kelompok yang dipilih diantara anggota dan oleh anggota atas dasar musyawarah. Di Bandar Bakau sendiri, terdapat KTH Bandar Bakau yang dibentuk oleh penyuluh kehutanan. Selain Kelompok Tani Hutan, terdapat Kelompok Usaha Bersama Redam Pilo *Creative* dengan memanfaatkan tenaga pemuda sekitar sebagai kelompok wirausaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Diketahui bahwa terdapat 13 pengurus KUB redam piloe *creative* dengan seorang ketua, sekretaris dan bendahara. Dalam mengelola sumber daya alam kawasan Bandar Bakau, Lembaga Swadaya Masyarakat Pecinta Alam Bahari dibentuk atas kepedulian masyarakat dalam restorasi budidaya ekoeduwisata di kota Dumai. Asbullah (dalam Mulyadi,2021) telah mengidentifikasi bahwa ada 5 program yang dilaksanakan LSM Pecinta Alam Bahari(PAB) dalam mempertahankan kawasan ekosistem ekoeduwisata Bandar Bakau Dumai: Sekolah alam Bandar Bakau; Bank *mangrove*; Aksi bersih sungai dan pantai; Aktivitas masyarakat berbasis lingkungan dan Eksplorasi kawasan konservasi menjadi destinasi wisata (ekoeduwisata).

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah lembaga yang diinisiasi oleh seorang aktivis lingkungan sebagai Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat Pecinta Alam Bahari sekaligus pembina dari Kelompok Tani Hutan Bandar Bakau serta Kelompok Usaha Bersama Redam Pilo *Creative*. Terdapat Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis) Bandar Bakau sebagai kelompok swadaya yang tumbuh dari masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di kawasan Bandar Bakau. Dalam menjalankan fungsinya kelompok ini didampingi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Pentingnya pemberdayaan sebagai upaya penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat disekitar Bandar Bakau. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Pelatihan Sadar Wisata dengan sasaran Pokdarwis di lingkungan Kota Dumai. Kegiatan ini pun diikuti oleh pokdarwis Bandar Bakau. Kemudian, di tahun selanjutnya telah dilaksanakan pelatihan budidaya lebah madu yang diselenggarakan oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api dengan sasaran seluruh Kelompok Tani Hutan di Kota Dumai dan pada tahun yang sama terdapat program penyuluhan pengelolaan bank sampah untuk mengatasi permasalahan limbah plastik yang diselenggarakan oleh Universitas Riau (Fakultas Perikanan) di Bandar Bakau dengan sasaran seluruh kelompok

masyarakat pengelola Bandar Bakau. Dan pada tahun 2023 telah dilaksanakan *Workshop* pembibitan dan penanaman Bakau oleh PHR (Pertamina Hulu Rokan) dan Universitas Riau dengan sasaran Kelompok Tani Hutan Bandar Bakau dan masyarakat sekitar.

Adapun mitra yang telah menjalin kerjasama dengan Bandar Bakau hingga tahun 2023 ialah Pertamina Hulu Rokan, Pertamina Patra Niaga, Universitas Riau, Rumah Zakat, dan PT. Angkasa Pura II. Salah satu lembaga yang membantu infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat ialah Pertamina Hulu Rokan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*). Sejak 2022 telah dilakukan upaya pembangunan infrastruktur di Bandar Bakau dan ditargetkan untuk selesai pada tahun 2023. Kegiatan pemberdayaan yang diikuti oleh masyarakat di kawasan Bandar Bakau mayoritas secara maupun spontan yang diadakan oleh berbagai kelembagaan non kementerian maupun sebagai pemenuhan bentuk tanggung jawab sosial lingkungan. Dengan kegiatan tersebut menghasilkan pola pemberdayaan masyarakat secara kemitraan karena mengandalkan upaya kerjasama.

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai program pemberdayaan yang telah terlaksana, sasaran dari program tersebut mencakup kelompok Masyarakat di Bandar Bakau. Adapun program-program yang telah terlaksana diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga dalam setiap rangkaian kegiatannya harus melaksanakan pengawasan ataupun evaluasi untuk menilai ketercapaian program tersebut apakah sudah sejalan dengan tujuan maupun harapan yang hendak dicapai. Namun berdasarkan pengamatan, program-program yang telah dilaksanakan (dalam tabel 1.2) belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian masyarakat, hal ini dapat diurai antara lain: Kurang adanya kesadaran pemerintah kota dan setempat dalam memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat; Program yang dilaksanakan bersifat insidental atau tidak secara rutin; Berbagai program belum menstimulasi semangat masyarakat untuk berwirausaha; Belum ada program dalam mengelola dan mengembangkan hasil hutan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat di Bandar Bakau akan sangat membantu dalam upaya pelestarian dan konservasi lingkungan bagi perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan Chamber (dalam Noor, 2011) yang menjelaskan bahwa konsep pembangunan menggunakan pendekatan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi justru berupaya memberikan perhatian pada tindakan solutif dengan *output* meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat di kawasan ekowisata Bandar Bakau kota Dumai dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kawasan ekowisata Bandar Bakau kota Dumai.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Saleh (2017:4) metode penelitian kualitatif pada dasarnya adalah metode pemaknaan atau interpretasi terhadap sebuah fenomena atau gejala, baik pada pelakunya maupun produk dari tindakannya. Sedangkan pengertian pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2021: 25) bahwa metode penelitian kualitatif ialah metode yang berdasarkan filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan pada generalisasi. Berdasarkan dua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh bertujuan memahami fenomena yang terjadi dalam lingkungan objek penelitian

menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi yang dituangkan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip (Zuhri, 2021). Alasan penulis menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian studi kasus berusaha menggambarkan kehidupan dan tindakan-tindakan manusia secara khusus pada lokasi tertentu dengan kasus tertentu.

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kawasan Ekoeduwisata Bandar Bakau Kota Dumai, di Jalan Nelayan Laut, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena pemberdayaan di kawasan ekoeduwisata Bandar Bakau Kota Dumai penting untuk di analisis secara mendalam guna mengukur sejauh mana serta mengetahui berbagai program pemberdayaan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang mandiri dalam berwirausaha dengan mengandalkan keunggulan ekologi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Wawancara (*interview*). Esterberg (dalam Sugiyono 2021:497) mendefinisikan wawancara/*interview* sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dimanifestasikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ditujukan kepada Pembina Pecinta Alam Bahari Bandar Bakau/pengelola Bandar Bakau, anggota Kelompok Tani Hutan, anggota Kelompok Usaha Bersama Redam Piloe Creative, anggota kelompok sadar wisata Bandar Bakau, penyuluh hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit III Riau, Pertamina Hulu Rokan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisata. Wawancara dilakukan pada masyarakat bertujuan untuk melengkapi data sebagai pihak pelaksana program pemberdayaan, sedangkan wawancara pada pihak manajemen untuk mengetahui sejauh mana kontinuitas dan operasional program dalam mewujudkan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan).
2. Observasi. Marshall menjelaskan observasi (dalam Sugiyono 2021:490) **ialah** "*through observation, the research learn about behaviour and the meaning attached to those behaviour*" yang artinya bahwa melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Selain itu, Nasution (dalam Sugiyono 2021:490) juga menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan fakta, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan bantuan berbagai alat, sehingga fokus pada penelitian akan tergambar dengan jelas. Tahap observasi ini dilakukan guna untuk mengumpulkan bahan-bahan data yang dibutuhkan, observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan pada fenomena yang terdapat pada objek pengamatan. Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai pemberdayaan masyarakat di kawasan ekoeduwisata Bandar Bakau kota Dumai.
3. Dokumentasi. Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi menggunakan catatan atau dokumen dari lokasi penelitian atau dari sumber lain yang terhubung ke item penelitian. Data termasuk file, foto, dan masih banyak lagi. Dokumentasi untuk penelitian ini akan berasal dari catatan public yang tersedia oleh otoritas terkait dan sejumlah catatan public tambahan yang dikumpulkan di lokasi penelitian, khususnya di Bandar Bakau Kota Dumai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Ekoeduwisata Bandar Bakau

Ilmu administrasi publik pada aspek pemberdayaan mengacu pada istilah *administration by public* yaitu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk itu, (Keban, 2014). Selanjutnya (Keban, 2014) mengatakan bahwa “kegiatan pemerintah mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa menggantung hidupnya pada pemerintah”. Menurut (Osborne, 2000) pemberdayaan dalam tiga sub bahasan yaitu pemberdayaan organisasi, pemberdayaan pegawai dan pemberdayaan masyarakat. Menurut (David. dan P.Osborne, 2000) pemberdayaan masyarakat dalam konteks New Public Management (NPM) memiliki keunggulan yaitu; 1) Masyarakat lebih memiliki komitmen terhadap anggotanya dibanding sistem pemberian pelayanan terhadap kliennya. 2) Masyarakat lebih memahami permasalahannya sendiri dibanding pemberi jasa profesional. 3) Professional dan birokrasi memberikan layanan; masyarakat memecahkan masalah. 4) Lembaga dan professional menawarkan jasa; masyarakat menawarkan kepedulian. 5) Masyarakat lebih fleksibel dan lebih kreatif dibanding pelayanan birokrasi yang besar. 6) Masyarakat jauh lebih murah dibanding profesional. 7) Masyarakat menegakkan standar perilaku secara lebih efektif di banding birokrasi atau profesional. 8) Masyarakat memfokuskan pada kapasitas; system jasa memfokuskan pada defisiensi. Peneliti menganalisis pemberdayaan masyarakat menggunakan teori tahapan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Randy R Wrihatnolo dan Dwijowijoto (dalam Bahri, 2019) bahwa pemberdayaan yang efektif ialah yang dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan agar memberi ruang serta ekosistem yang relevan dengan kondisi masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menerima kegiatan pemberdayaan.

Penyadaran

Tahap ini merupakan tahap awal dan penting untuk dilakukan sebagai instrumen fundamental dalam membangun perhatian masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu, dalam tahapan ini pendamping akan menciptakan prakondisi agar dapat menghasilkan iklim yang memfasilitasi berlansungnya proses pemberdayaan secara efektif. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran tentang kondisi lapangan, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi yang bertujuan untuk keberlangsungan masa mendatang. Selain itu, tahap ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi lingkungan yang hendak dijadikan sarana pengembangan dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Prinsip dasarnya ialah membuat masyarakat mengerti akan potensi yang mereka miliki serta mampu memetakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang mengenai tata kelola maupun keberlangsungan biodiversitas. Adapun luaran yang diharapkan setelah menempuh tahap ini, masyarakat setidaknya sudah mengerti bahwa mereka pantas untuk independen dalam mendayagunakan potensi yang mereka miliki guna mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Fokus perhatiannya ialah pada meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam mengenal potensi lingkungan dan kelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam memanfaatkan potensi tersebut. Namun rasa cinta kelompok masyarakat dalam mengoptimalkan potensi tersebut masih kurang. Hal tersebut memberi implikasi pada kuantitas dari masyarakat pengelola yang semakin menipis.

Setelah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa tahap ini telah terpenuhi dibuktikan dengan penyuluhan yang telah dilakukan oleh KPH Unit III Riau sehingga masyarakat telah mengenali potensi lingkungan sejak lama dan penyuluhan mengenai pengelolaan bank sampah yang diinisiasi oleh Universitas Riau. Hal ini dibuktikan dengan kelompok masyarakat yang memanfaatkan *mangrove* sebagai kawasan wisata. Selain itu, Kelompok Usaha Bersama Redam Piloe juga memanfaatkan peluang kekayaan sumber daya alam tersebut hingga menciptakan ruang bisnis seperti *caffe* yang bernama Redam Piloe. Namun sangat disayangkan untuk Kelompok Usaha Bersama masih belum mendapat program yang tepat guna untuk keberlangsungan bisnis yang mereka tempuh.

Pengkapasitasan

Tahap ini sering disebut dengan "*Capacity Building*" yang dalam bahasa lebih sederhana yaitu memampukan atau pembangunan kapasitas. Terlebih dahulu masyarakat yang bersangkutan harus mampu mengenali potensinya agar siap untuk diberikan kuasa atau daya. Secara leksikal, *capacity building* ini terdiri atas 3 jenis yaitu: manusia, organisasi, dan sistem nilai. Upaya peningkatan kapasitas manusia memiliki arti menciptakan manusia yang berdaya baik dalam aspek individu maupun kelompok. Konsep ini terdengar tidak asing karena sama halnya seperti seminar, *Workshop*, pelatihan, dan sejenisnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar kelompok masyarakat agar memiliki kapasitas dalam mengelola potensi tersebut. Pada hakikatnya adalah memberikan kekuatan kepada individu dan kelompok manusia untuk mendapatkan kekuasaan atau daya yang ditransmisikan. Pengkapasitasan organisasi dapat dilakukan dalam bentuk menciptakan wadah yang akan menaungi kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama dan dapat dilakukan dengan reformasi struktur organisasi yang hendak mendapatkan keterampilan tersebut. Misalnya, sebelum diberikan ruang usaha, bagi kelompok masyarakat miskin dibuatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK). Kita sering mengabaikan sudah sejauh apa pengembangan organisasi maupun budaya kerja didalamnya, dapat dianalogikan seperti "mempersiapkan wadah/pot yang tepat untuk meletakkan bibit" sama seperti sebelum kita menanam bibit jagung, kita harus mampu menyiapkan lahan yang tepat untuk menampung pertumbuhannya.

Pengkapasitasan ketiga ialah sistem nilai. Setelah mendayagunakan masyarakat dan wadahnya, demikian pula dengan sistem nilai di dalamnya. Sama halnya dengan permainan, sistem nilai adalah aturan dalam bermain. Sebuah sistem nilai yang berlaku dalam organisasi berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem dan prosedur, peraturan koperasi dan sejenisnya. Dewasa ini, sistem nilai melingkupi budaya organisasi, kode etik, tata kelola organisasi. Dalam meningkatkan sistem nilai dapat dilakukan dengan menolong masyarakat serta menciptakan "aturan main" yang sesuai dengan kapabilitas yang mereka miliki. Fokus perhatian pada tahap ini ialah peningkatan kapasitas manusia, organisasi dan sistem nilai yang tepat dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Secara teoritis, tahapan pengkapasitasan terdiri atas 3 bagian yaitu manusia/individu, organisasi dan sistem nilai. Dalam hal ini peneliti akan mengurai ketercapaian masing-masing tahapan yaitu:

1. Manusia. Manusia adalah penggerak peradaban dan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, pengkapasitasan manusia sudah terpenuhi dibuktikan dengan berbagai kegiatan dan pelatihan, seperti pelatihan sadar wisata, pelatihan ternak lebah madu, *Workshop* penanaman dan pembibitan bakau serta penyuluhan pengelolaan sampah. Tahapan ini terpenuhi meskipun dilakukan secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Najiyati, dkk(2014) terdapat 4 prinsip yang terdiri dari kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan

keberlanjutan, yang mengatakan bahwa pentingnya keberlanjutan dalam menggerakkan program pemberdayaan untuk memastikan bahwa masyarakat akan mencapai kemandirian sosial maupun finansial, hal ini merupakan tantangan yang memakan waktu panjang bagi para pendamping karena harus berhadapan dengan mindset, emosional dan mental masyarakat.

2. Organisasi. Dalam buku Erni Rernawan (2011: 15), dikutip pengertian organisasi dari Mathis and Jackson sebagai berikut: "Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan. Dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana pihak lain memberikan perhatian atau atensi terhadap optimalisasi pola kerja dalam organisasi tersebut. Perhatian atau atensi tersebut dapat terlihat dalam bentuk upaya peningkatan peranan kelompok masyarakat dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, pengkapasitasan organisasi belum terpenuhi karena belum ada pihak pendamping yang memberikan perhatiannya terhadap pola kinerja organisasi.
3. Sistem Nilai. Sistem nilai adalah keseluruhan konsep yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi tentang ukuran baik buruk berdasarkan keyakinan tertentu. Budaya organisasi adalah apa yang dipersepsikan orang dalam organisasi, dan cara pandang/persepsi itu menciptakan suatu pola keyakinan, nilai, dan ekspektasi. Pentingnya membangun aspek sistem nilai yang kooperatif dalam kelompok masyarakat demikian akan membentuk iklim organisasi dan budaya kerja yang inklusif. Pemberdayaan lebih dari sekedar penguatan individu maupun perbaikan infrastruktur, namun pemberdayaan juga meliputi pranata-pranatanya. Adapun pranata yang dimaksud ialah nilai-nilai yang terbentuk menjadi budaya dalam kelompok masyarakat seperti transparansi, akuntabilitas, sikap profesional, dan lainnya. Demikian dengan pembaharuan institusi-institusi sosial dan proses integrasi ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya. Yang menjadi poin utama dan esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya. Untuk membentuk hal tersebut, peranan dari eksternal maupun internal masyarakat sangat diperlukan dalam memandu arah dan pencapaian tujuan kelompok masyarakat sebagai komponen yang penting dalam pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, pengkapasitasan organisasi belum terpenuhi karena belum ada pihak pendamping yang memberikan perhatiannya terhadap sistem nilai dalam kelompok masyarakat. Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi, peneliti menemukan bahwa tahap ini belum terpenuhi secara maksimal. Dapat dinilai bahwa pada aspek manusia terpenuhi dibuktikan dengan program-program yang berfokus pada peningkatan kapasitas manusia. Namun dalam aspek kelembagaan seperti organisasi dan sistem nilai masih belum terpenuhi karena masih belum ada program maupun aktivitas yang terkonsentrasi menata pola organisasi dan sistem nilai tersebut.

Pendayaan

Dalam makna sempit pendayaan sama halnya dengan pemberian daya atau "*empowerment*". Dititik ini, masyarakat akan menerima wewenang, kekuasaan, kesempatan maupun peluang. Pemberian ini sejalan dengan kualitas keterampilan yang mereka miliki termasuk pemberian dana atau hibah. Gagasan utamanya ialah dalam fokus kekuasaan atau otoritas yang hendak diberikan relevan dengan kapabilitas masyarakat dan potensi yang dimiliki target. Bahkan ketika hendak memberikan kredit atau sejumlah uang kepada

kelompok masyarakat miskin yang telah menempuh proses sebelumnya seperti penyadaran dan pengkapasitan masih diperlukan pertimbangan yang hendaknya menghasilkan kesesuaian antara biaya yang diberikan dengan keterampilan masyarakat dalam mengelola suatu usaha. Adanya *monitoring* atau pengawasan akan sangat bijak dalam memastikan rangkaian pemberdayaan sejalan dengan strategi dan tujuan yang hendak dicapai pihak pemberdaya. Tahap ini berfokus pada pemberian peluang seperti otoritas atau kekuasaan kepada masyarakat yang hendak diberdayakan untuk melihat bagaimana ketercapaian keterampilan yang telah dilakukan sebelumnya dengan memberikan bantuan atau otoritas yang sebelumnya tidak mampu diakses oleh masyarakat agar masyarakat mampu berdaya dengan melakukan tata kelola secara mandiri dengan memanfaatkan otoritas tersebut. Pentingnya tahap ini ialah untuk menilai kemandirian masyarakat setelah diberikan *power* yang relevan dengan kemampuan mereka serta melihat bagaimana kemampuan mereka dalam mengelola otoritas tersebut untuk mendatangkan keswadayaan atau kemandirian itu sendiri. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep yang menggambarkan tanggungjawab perusahaan terhadap tindakan dan kebijakan perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan alam dan komunitas dimana perusahaan itu beroperasi. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia, sebagian besar masih bersifat karitatif, tidak diselenggarakan secara terencana dan bersifat temporer atau berorientasi jangka pendek. CSR masih dianggap sebagai bentuk kegiatan amal perusahaan. Dengan demikian, motivasi untuk menjalankan CSR lebih didorong oleh kesadaran sosial spiritual. Belum banyak perusahaan yang menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis

Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Ekoeduwisata Bandar Bakau

1. Program pemberdayaan yang tidak berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan merupakan suatu pendekatan *bottom up* karena dalam prakteknya masyarakat difokuskan sebagai aktor utama yang harus memiliki keswadayaan serta kemandirian, sayangnya pendekatan yang sering digunakan ialah pendekatan *top down*. Hal ini memiliki korelasi dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut yang salah satunya berisi mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (Najiyati, S, dkk, 2005:59) yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan berkelanjutan, sehingga program pemberdayaan perlu dirancang secara berkelanjutan sampai pada pencapaian tujuannya yaitu masyarakat yang mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan memang selalu membutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai nilai-nilai kemandirian tersebut.
2. Regulasi yang mengatur mengenai upaya pengelolaan secara konservasi. Kekayaan biodiversitas sangat potensial untuk dikembangkan melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Sebagai wilayah yang ditujukan untuk konservasi, regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk menegaskan bahwa wilayah tersebut berhak dikelola oleh masyarakat setempat sebagai wilayah konservasi yang mendatangkan nilai sosial ekonomi bagi masyarakat. Konservasi merupakan kekuatan yang konkrit untuk ditegaskan sebagai landasan teknis dalam mengelola potensi alam. Tidak hanya itu, regulasi juga diperlukan sebagai landasan teknis yang rigid dalam kelola kelompok masyarakat. Regulasi itu yang juga perlu di pertegas oleh pihak pemerintah kota mengenai keterlibatan mereka dalam memberikan atensi terhadap masyarakat yang hidup di kawasan wisata Kota Dumai. Stakeholder seperti pemerintah kota seharusnya turut ambil peran dalam pengembangan maupun pemberdayaan masyarakat.

3. Kurangnya inovasi dalam pemanfaatan *mangrove*. Sebagai kekayaan alam yang jumlahnya paling dominan di bandar bakau, pemanfaatan *mangrove* akan memperluas kapasitas kelompok masyarakat dalam meningkatkan pencapaian pada prospek ekonomi. Di Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di Sumatra Utara, buah *mangrove* dapat diolah menjadi tepung dan beragam bahan pangan olahan seperti sirup, keripik, dodol, dan olahan makanan ringan lainnya. Produk olahan dari buah *mangrove* memiliki prospek yang bagus jika dapat diolah dengan standar mutu yang baik serta didukung oleh promosi yang baik. Dengan usaha menghasilkan produk pangan yang komersil diharapkan masyarakat dapat menambah kemampuan finansial untuk akses terhadap sumber pangan lainnya. Sudah tentu buah atau bagian lain tanaman *mangrove* yang dapat dikonsumsi tidaklah ditujukan sebagai makanan utama, melainkan lebih untuk tujuan penganekaragaman pangan. Selain untuk mengurangi konsumsi makanan pokok (beras, jagung dan sagu), hasil olahan dari buah *mangrove* yang berupa tepung dapat digunakan sebagai bahan baku untuk menggantikan terigu sebagai sumber karbohidrat. Dari berbagai jenis *mangrove* yang ada buah pedada atau *Sonneratia caseolaris*, dengan kandungan karbohidrat 19,66% sangat potensial untuk diolah menjadi tepung. Berdasarkan temuan lapangan, kelompok masyarakat masih belum memiliki kebaruan inovasi dalam mengelola *mangrove*. Hal ini sangat disayangkan mengingat peluang *mangrove* yang jumlahnya cukup besar di kawasan bandar bakau. Pemanfaatan *mangrove* secara berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat hingga mampu mandiri secara finansial. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisita Prabawati (2018) yang memiliki temuan bahwa setelah dilaksanakannya pemberdayaan, masyarakat Desa Kaliwlingi keterampilan dan kapasitas masyarakat meningkat secara signifikan, meningkatnya sosial ekonomi masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.
4. Lemahnya Komitmen Masyarakat. Partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini kontradiktif dengan prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Effendi (dalam Bahri, 2013) yang menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil. Partisipasi masyarakat merupakan aspek pembentuk utama dalam menciptakan masyarakat yang berdaya dan memiliki swadaya. Namun temuan di lapangan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat masih minim. Untuk itu partisipasi yang dimaksudkan akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang terkonsentrasi secara *bottom up*. Menurut Rode dan De Smit(2012), perencanaan secara *bottom up* dipahami sebagai perencanaan yang mencakup proses perumusan tujuan tertentu dan langkah alternatif yang diperlukan melalui musyawarah untuk menyusun program-program pembangunan daerah yang mana bergantung pada partisipasi kelompok masyarakat. Selain itu, menurut Sumodiningrat, masyarakat menjadi pusat perhatian dan pelaku utama pembangunan. Jikalau partisipasi masyarakat sangat minim akan menghambat beberapa bentuk koordinasi antar orang yang memiliki kepentingan.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di bandar bakau kota Dumai masih belum terlaksana secara maksimal ditunjukkan dengan terpenuhinya tahapan penyadaran, pengkapasitasan (aspek pengkapasitasan manusia) dan pendayaan. Sementara itu, pengkapasitasan dalam aspek organisasi dan sistem nilai belum terpenuhi. Hal yang penting untuk disoroti ialah program pemberdayaan masyarakat yang masih terlaksana bersifat insidental atau hanya dilakukan pada waktu tertentu dan tidak rutin. Padahal salah satu

prinsip dari pemberdayaan ialah *sustainable* atau berkelanjutan. Dalam mewujudkan prinsip tersebut dengan memanfaatkan nilai lingkungan, ekowisata Bandar Bakau dan ragam potensi lain yang ada di sekitarnya merupakan usaha dalam proses pemberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi. Untuk itu, pemberdayaan akan memiliki korelasi dengan pengembangan kawasan ekowisata Bandar Bakau. Harapan dari pengembangan akan tercapai kesejahteraan masyarakat terutama melibatkan usaha masyarakat sehingga persoalan ekonomi dapat diatasi. Disamping itu, Bandar Bakau merupakan penyangga lingkungan dari abrasi yang terjadi hampir setiap tahun. Ini menjadi potret bahwa Bandar Bakau tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga fungsi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi lapangan menunjukkan bahwa tujuan untuk memberdayakan dari sisi ekonomi belum terwujud secara signifikan.

Pada prinsipnya, Bandar Bakau merupakan kawasan strategis yang difungsikan tidak hanya sebagai objek wisata tetapi juga fungsi konservasi ekologi. Bandar Bakau harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola kawasan namun tetap mempertahankan elemen-elemen kelestarian lingkungan. Sementara jika dikaitkan dari sisi sosial ekonomi, Bandar Bakau diharapkan dapat berkembang optimal, menarik wisatawan, dan menjadi pusat ekonomi masyarakat Kota Dumai yang terhubung langsung dengan beberapa Kabupaten seperti Bengkalis serta Kepulauan Meranti serta mancanegara khususnya Malaysia. Kondisi demikian merupakan harapan tersendiri bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara umum di Kelurahan Pangkalan Sesai maupun yang tinggal berdekatan dengan Bandar Bakau. Adapun faktor penghambat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kawasan ekowisata Bandar Bakau ialah program pemberdayaan yang tidak berkelanjutan karena hal ini tidak akan efektif untuk memberi ruang yang cukup kepada masyarakat, fasilitas masih tidak lengkap, regulasi yang mengatur mengenai upaya pengelolaan secara konservasi, kurangnya motivasi untuk bekerja, dan kurangnya komitmen masyarakat.

Adapun rekomendasi penelitian ini disampaikan kepada beberapa pihak yaitu: Pendamping/Pemberdaya; Penulis menyarankan untuk setiap pendamping maupun pemberdaya yang akan melakukan pemberdayaan di Bandar Bakau hendaknya mengusung konsep pemberdayaan *bottom up* agar mampu menjangkau dan melibatkan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan dan mampu menghasilkan beragam keputusan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, pihak pendamping dapat melibatkan akademisi ketika melakukan peninjauan lapangan atau masukan teoritis yang membangun untuk teknis pemberdayaan. Pemerintah; Penulis menyarankan pemerintah untuk mempertegas regulasi yang jelas dan linier mengenai kepentingan konservasi di Bandar Bakau. Selain itu, memberi dorongan berupa bantuan materil dan non materil kepada kelompok masyarakat agar memiliki motivasi dalam mengembangkan potensi di lingkungan Bandar Bakau. Pemerintah dapat melakukannya dengan mengadakan sosialisasi atau pendampingan secara langsung ke kelompok masyarakat, agar tercapai keberhasilan pemberdayaan melalui kegiatan ekowisata, produksi kewirausahaan untuk menghasilkan masyarakat yang mampu mandiri secara ekonomi maupun kelola hutan yang bertanggung jawab. Kelompok Masyarakat; Penulis menyarankan kelompok masyarakat melakukan analisis AMDAL dengan melibatkan berbagai aktivis lingkungan guna memperjelas visi misi dalam kelompok masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta meningkatkan program wirausaha di kawasan bandar bakau, dengan contoh menciptakan usaha kuliner kepiting *mangrove* untuk meningkatkan keuntungan ekonomis melalui pemanfaatan hasil hutan. Tidak hanya itu, kelompok masyarakat dapat menjalin kolaborasi multipihak seperti pentahelix, hal ini dapat menghemat biaya dan meningkatkan energi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z(2021). Metode Penelitian Kualitatif. ISBN: 978-623-97534-3-6. Makassar: Syakir Media Press.
- Ana, C. 2015. 12 Manfaat Hutan Ekoeduwisata bagi Kehidupan Manusia.
- Anggara, S., & Sumantri, Ii.(2016). Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik. ISBN: 978-979-076-576-2. Bandung: Pustaka Setia.
- Apriyani, L. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Disertasi. Tidak diterbitkan.
- Bahri, E.S.(2019). Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. ISBN: 978-602-335-503-7. Kediri: FAM Publishing.
- Hamid,H.(2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. ISBN: 978-602-263-146-0. Makassar: De La Macca.
- Ibrahim, R. M. (2022). *Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau Oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Disertasi. Tidak diterbitkan.
- Indrianti, D. T., Ariefianto, L., & Halimi, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 13-18.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukawening. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(1), 53-62.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. Ekoeduwisata dan Manfaatnya.
- Kinasih, P. I., & Purnaweni, H. (2019, November). Pemanfaatan Ekoeduwisata Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *In Conference on Public Administration and Society* (Vol. 1, No. 01).
- Mardikanto, T & Soebianto, P. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Mashur, D., Azhari, F. M., & Zahira, P. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Niara*, 13(1), 172-179.
- Meiwanda, G., Lubis, E. E., Nasution, M. S., & Habibie, D. K. (2020, October). Peatland management based on Education for Sustainable Development (ESD). In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1655, No. 1, p. 012142). IOP Publishing.
- Mulyadi, A., Efriyeldi, E., & Marbun, B. (2021). Strategi pengembangan ekowisata ekoeduwisata Bandar Bakau Dumai, Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 8(1), 48-56.
- Mulyadi, E., Hendriyanto, O., & Fitriani, N. (2010). Konservasi hutan ekoeduwisata sebagai ekowisata. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2(1), 11-18.
- Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. *Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*.. ISBN: 979-99373-6-1. Bogor: Wetlands International. *Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada*.
- Ngusmanto.(2015). Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan. ISBN: 978-602-318-059-2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Pati, T. K. & Alfiatun,N(2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Skripsi. Tidak diterbitkan.

- Pearse, Andrew dan Michael Stiefel. 1979. *Inequality Into Participation: A Research Approach*, Geneva, UNRISD.
- Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039
- Peraturan Daerah Provinsi Riau no. 10 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau 2018-2039
- Pujayanti, T., & Mashur, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program CSR PT. PJB UBJOM PLTU Tenayan di Kelurahan Industri Tenayan. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 101-116.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Saleh, S.(2017). Analisis Data Kualitatif. ISBN: 979-604-304-1. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Santoso, A. A. P. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Disertasi. Tidak diterbitkan.
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Surat keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 903 tahun 2016 tentang tata ruang Riau.
- Syaiful, S., & Yuliani, F. D. (2022). Inventarisasi Potensi dan Persepsi Wisatawan terhadap Daya Tarik Wisata Kawasan Hutan Ekoeduwisata Bandar Bakau Kota Dumai. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1411-1417.
- Yaslan, Muhammad, Rd Siti Sofro Sidiq, and Swis Tantoro. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandar Bakau Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir." *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi* 24.1 (2023): 41-54.
- Yuliarti, I. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Madani*, 4(2), 1-12.
- Yunus, S., dkk(2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. ISBN: 978-602-5440-02-1. Banda Aceh
- Zulkarnaini, Z., & Lubis, E. E. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawa gambut secara berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 89-96
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., & Wawan, W. (2023). Strengthening Community Social Capital In Peatland Management. *Sosiohumaniora*, 25(1)